

**Judul** : Rumah warga NTT rusak parah, prioritaskan bangun hunian sementara  
**Tanggal** : Jumat, 21 Agustus 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 9

Rumah Warga NTT Rusak Parah

## Prioritaskan Bangun Hunian Sementara

ANGGOTA Komisi V DPR Sudjatmiko menilai penyediaan hunian perlu jadi prioritas utama dalam penanganan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga korban bencana alam tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.

Sudjatmiko mengatakan, penanganan pertama yang perlu segera diselesaikan para petugas yaitu perbaikan fasilitas. Langkah kedua yang sangat mendesak adalah pembuatan hunian, baik sementara maupun tetap. Sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama bertahan di dalam tenda penampungan pengungsian yang serba terbatas.

Dia bilang, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan langkah strategis penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. "Setelah kebutuhan sementara terpenuhi, pembangunan hunian tetap bagi warga harus segera direalisasikan," ujarnya Rabu (19/8/2026).

Bencana gempa bumi di NTT, lanjutnya, menyebabkan sejumlah bangunan fisik maupun rumah milik warga mengalami kerusakan sangat parah. Untuk itu, penanganan masyarakat terdamp-

pak perlu dilakukan secara bertahap. Mulai dari proses evakuasi, penyediaan hunian sementara, hingga rekonstruksi kembali hunian yang rusak akibat bencana.

Sementara, proses pencarian dan evakuasi para korban terdampak hingga kini masih terus berlangsung di lapangan. Diketahui, Basarnas mengerahkan berbagai sarana dan peralatan darat maupun laut untuk menjangkau seluruh lokasi terdampak. Khususnya kawasan pemukiman yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi saat ini.

Karena itu, koordinasi antarseluruh kementerian dan lembaga terkait dengan Pemda diharapkan semakin kuat, agar penanganan warga berlangsung cepat. Kerja sama Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PU, serta Kementerian PKP harus berjalan optimal untuk mewujudkan pembangunan hunian bagi para pengungsi.

Kata dia, setelah tahap tanggap darurat bencana selesai, Pemerintah wajib memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan terencana. "Itu agar seluruh warga terdampak dapat segera bangkit kembali menjalani kehidupan masyarakat secara normal seperti sedia kala," ucapnya.



Sudjatmiko

Senada, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta Pemerintah mempercepat pemulihan tempat tinggal bagi 4.000 masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah perlu menetapkan target kerja yang jelas. Agar warga tidak bertahan terlalu lama di posko dan bisa segera menempati hunian.

Sebagai langkah awal, Saan mengingatkan Pemerintah agar memetakan kerusakan rumah warga dari kategori tingkat berat, sedang, hingga ringan. Pemetaan data itu mempercepat penanganan teknis di lapangan. Sekaligus berdampak nyata pada pengurangan bertahap jumlah 4.000 pengungsi yang berada di lokasi penampungan.

Selama proses pemulihan serta

pembangunan hunian bagi masyarakat, seluruh kebutuhan pokok warga harus terus dipenuhi. "DPR berkomitmen mengawal penanganan bencana ini hingga tahap pemulihan tuntas, agar masyarakat kembali beraktivitas secara normal seperti biasa," katanya.

Sementara, Menteri PKP Maruar Sirait memastikan, Pemerintah segera membangun rumah untuk korban gempa di NTT. Persiapan pembangunan hunian tetap itu dilakukan walau wilayah terdampak masih berada dalam masa tanggap darurat. Pemerintah tidak perlu menunggu masa darurat berakhir untuk menyiapkan rumah warga terdampak.

Kata dia, penanganan sektor perumahan harus berjalan lebih cepat dengan melibatkan Pemda. Pemerintah mempersiapkan pembangunan hunian sembari penanganan kondisi darurat masih berjalan. Karena itu, seluruh pihak wajib bekerja sama serta bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan hunian.

Maruarar menyebut, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mempercepat penanganan kebutuhan perumahan masyarakat terdampak gempa di NTT. Makanya, jajarannya diminta mempercepat

pekerjaan fisik serta memperkuat koordinasi dengan Pemda. "Untuk memastikan penanganan pembangunan rumah di terlaksana dengan tepat dan cepat," tegasnya.

Pembangunan hunian tetap, sambunginya, jadi bagian dari proses pemulihan pascabencana. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal dalam hunian sementara. Apalagi, persiapan pembangunan rumah saat masa tanggap darurat masih berlangsung bukan pola baru bagi Pemerintah dalam menangani bencana alam di Indonesia.

Contoh nyata terlihat pada penanganan bencana di Sumatera. Dimana Pemerintah memulai pembangunan rumah permanen ketika proses tanggap darurat masih berlangsung. "Pengalaman itu jadi pelajaran berharga bagi Pemerintah untuk mempercepat penanganan sektor perumahan masyarakat terdampak gempa di NTT," terangnya.

Diketahui, gempa 7,7 magnitudo terjadi pada Sabtu (15/8/2026), dengan pusat di 38 km timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT pada kedalaman 15 km. Basarnas mencatat total korban mencapai 202 orang, dengan rincian 70 meninggal dunia, 40 luka berat, serta 92 luka ringan. Saat ini petugas masih terus menyisir lokasi. ■ PYB